

**IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN
PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

CESNO EFTWORY

Email : efwory@gmail.com

Pembimbing : Zaili Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ASBTRACT

Implementation of Curriculum 2013 at the elementary school in Pangkalan Koto Baru experiencing various problems because according to socialize standardization is done twice or more. However for the socialization of teachers in the district of Koto new Base is only done once. So the faculty as a human resources do not understand how to implement the curriculum in 2013 in accordance with existing standards. Then the implementing organizations involved establish standard operating procedures for the implementation of the curriculum in 2013. Handbook as infrastructure is inadequate because of delays in the distribution of books of the government for four months. The purpose of this research was to identify and analyze how the implementation of the curriculum in 2013 at the elementary school in Pangkalan Koto Baru and the factors that influence the implementation of the curriculum in 2013.

This research using Van Meter Van Horn theory which states that the successful implementation of a policy is the standard and policy objectives , resources, characteristics of the implementing organization , the communication between organizations , the attitude of the implementing policies and social environment , economic and political . This study used a qualitative exploratory methods , techniques of collecting data through observation and interviews where people that involved in this study as an informant.

The results showed that the implementation of the curriculum in 2013 at the elementary school in Pangkalan Koto Baru has not been done optimally because there are still many weaknesses in the current curriculum in 2013 is implemented in Pangkalan Koto Baru. Inhibiting factors affecting the implementation of the curriculum in 2013 at the elementary school in Pangkalan Koto Baru is socialization which is not maximized , inadequate means and Standard Operating Procedure (SOP) which has not been established .

Keywords : Implementation , Curriculum 2013, Elementary School

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda dan mewujudkan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah sekolah dasar, dimana anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Inti pokok pendidikan sekolah dasar adalah berupaya menanamkan keimanan terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing dan berharap siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan dan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Pendidikan di sekolah dasar benar-benar mendidik dan menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan pada siswa di sekolah dasar untuk memiliki sikap kebersamaan dalam upaya melahirkan generasi muda yang bertanggung jawab.

Pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik maka dapat diwujudkan pemerintah dengan melakukan berbagai inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi baru yang dibuat pemerintah untuk pendidikan adalah membuat program kurikulum 2013. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik secara menyeluruh. Aspek utama implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan dan kompetensi guru
2. Kepemimpinan, kultur dan manajemen sekolah
3. Perubahan *mind set*

Pada kenyataannya, implementasi kurikulum 2013 mengalami berbagai masalah mulai dari pusat sampai ke

daerah. Masalah yang banyak terjadi adalah di daerah yang jauh dari pusat informasi. Salah satu daerah tersebut adalah Kecamatan Pangkalan Koto Baru di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya sosialisasi, ketidaksiapan tenaga pengajar dan keterlambatan penyaluran buku pedoman bagi guru dan siswa/siswi menyebabkan perubahan yang diinginkan dari program kurikulum 2013 tidak tercapai dan penyelenggaraan pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik tidak terwujud sehingga berdampak buruk kepada perkembangan pendidikan anak didik di sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dimana peserta didik tidak mengerti dengan pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Implementasi Kurikulum 2013, maka penulis akan menjelaskan berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat.

TEORI PENELITIAN

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik dalam bentuk undang - undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dll (Nugroho, 2014:357).

Implementasi Kebijakan

Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam **Sujianto (2008:34)** mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

1. Standar dan tujuan kebijakan (*policy standart objectives*)

Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber daya kebijakan (*policy resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia

yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik pelaksana (*the characteristisof the implementing agencies*)

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, 2 buah karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (*SOP = Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

4. Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional

(interorganizational communication and enforcement activities)

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian – kejadian di lapangan. Selanjutnya menyeleksi data – data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya, diolah dan dianalisis secara deskriptif/kualitatif sesuai dengan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan kurikulum 2013 pada sekolah dasar adalah penting. Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap

standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Tujuan dari implementasi kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter bagi siswa/siswi Sekolah Dasar secara menyeluruh dengan cara menerapkan sistem penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar bisa menghadapi berbagai tantangan masa depan serta mempersiapkan Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan dilakukan berbagai perubahan dalam sistem pembelajaran di kurikulum 2013 ini mulai dari perubahan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.” (Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada sekolah dasar sudah jelas yaitu untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter bagi siswa/ siswi sekolah dasar secara menyeluruh agar bisa menghadapi berbagai tantangan masa depan serta mempersiapkan Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka dengan cara menerapkan berbagai perubahan pada sistem pembelajaran kurikulum 2013 yaitu perubahan pada standar kompetensi

lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Berikut hasil wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Elemen perubahan dalam implementasi kurikulum 2013 terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, Standar Isi yaitu kompetensi yang semula diturunkan dari matapelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi yang dikembangkan melalui Tematik terpadu dalam semua mata pelajaran, Standar Proses yaitu Standar Proses yang semula terfokus pada Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi dilengkapi dengan Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta, serta belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Selanjutnya adalah Standar Penilaian yaitu penilaian berbasis kompetensi. Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil) dan memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal

(maksimal). Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL, serta mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.”
(Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah jelas dimana perubahan yang diinginkan dalam kurikulum 2013 sangat besar sehingga diperlukan juga usaha atau implementor yang siap untuk mengimplementasikannya. Akan tetapi, implementasi kurikulum 2013 masih mengalami berbagai kendala di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Berikut hasil wawancara dengan Instruktur Pelaksana Kurikulum 2013 Perwakilan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Sosialisai kurikulum 2013 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru baru dilaksanakan sekali sebelum kurikulum 2013 diimplementasikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun ajaran 2014/2015. Dari 165 guru PNS pada tahun 2014 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya setengah dari jumlah guru PNS tersebut. Sedangkan guru honorer yang berjumlah 102 orang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013. Kalau untuk SOP kami belum ada nak.”
(Hasil Wawancara dengan Instruktur Pelaksana Kurikulum 2013 Perwakilan Kecamatan Pangkalan Koto Baru ibu Nelwati, S. Pd pada hari Rabu, 28 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan mengapa implementasi kurikulum 2013 mengalami berbagai kendala sedangkan tujuan dan standar kebijakan sudah jelas adalah kurangnya sosialisasi bagi tenaga pengajar dalam bentuk pendidikan dan pelatihan mengenai implementasi kurikulum 2013 yang sesuai dengan standar dan ukuran kebijakan. Kemudian organisasi yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga para implementor tidak memahami prosedur implementasi yang sesuai dengan standar dan tujuan implementasi kurikulum 2013.

2. Sumber daya

Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru harus didukung sumber daya yang memadai agar implementasi kurikulum 2013 berjalan dengan lancar dan tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya dana. Sumber daya manusia terdiri dari guru sebagai tenaga pengajar yang berkompentensi. Sumber daya waktu adalah dibutuhkan waktu untuk sosialisai program kurikulum 2013. Sumber daya dana adalah dibutuhkan dana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.” **(Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa implemntasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru harus didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas, adanya waktu sosialisasi yang cukup dan dana yang memadai untuk menunjang proses belajar belajar. Akan tetapi, implemntasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih mengalami berbagai kendala sedangkan sumber daya yang dibutuhkan sudah jelas. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum memadai.

Berikut hasil wawancara dengan Instruktur Pelaksana Kurikulum 2013 perwakilan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Guru SD masih banyak yang belum mengerti dengan cara untuk mencapai standar implementasi kurikulum pada sekolah dasar dengan benar karena kurangnya masa sosialisasi untuk guru mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai implementasi kurikulum 2013 yang sesuai dengan standar. Selain itu, guru juga tidak bisa menyediakan buku bagi para siswa/ siswi SD di Kecamatan Pangkalan Koto Baru karena penyaluran buku pedoman untuk guru dan siswa/ siswi SD yang disediakan oleh pemerintah sangat terlambat dimana buku tersebut bisa diterima pihak sekolah pada saat akhir semester. Sehingga orang tua siswa/ siswi SD di Kecamatan Pangkalan Koto Baru harus mengeluarkan biaya fotocopy buku yang ada di provinsi lain yang didapat melalui internet.” **(Hasil Wawancara dengan Instruktur Pelaksana Kurikulum 2013 Perwakilan Kecamatan Pangkalan Koto**

Baru ibu Nelwati, S. Pd pada hari Rabu, 28 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya sebagai sarana pendukung implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak memadai diantaranya kurangnya masa sosialisasi sehingga guru SD tidak memahami bagaimana implementasi kurikulum 2013 sekolah dasar yang sesuai dengan ukuran dan standar yang sebenarnya dan keterlambatan penyaluran buku pedoman bagi guru dan siswa menyebabkan orang tua siswa/ siswi SD harus mengeluarkan biaya untuk fotocopy buku provinsi lain yang didapat oleh guru dari internet, sedangkan biaya untuk operasional sekolah termasuk buku pedoman disediakan oleh pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan guru SDN 07 Pangkalan.

“Kami merasa kesulitan dalam menentukan sistem penilaian karena banyak sekali perubahan cara menilainya. Mata pelajaran yang di ajarkan dalam bentuk tema dimana satu dalam tema tersebut seluruh mata pelajaran di globalkan kecuali mata pelajaran agama dan PJOK. Sedangkan kami baru mendapatkan pelatihan satu kali dan belum semua guru mendapatkan pelatihan sehingga kami belum memahami bagaimana cara penilaiannya. Hal ini berdampak pada saat ujian tengah semester tahun ajaran 2014/2015 penilaian lembar jawabannya tertunda hingga tiga minggu.” (Hasil wawancara salah seorang guru kelas SDN 07 Pangkalan pada hari Kamis, 5 November 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketidaksiapan tenaga pengajar dalam implementasi

kurikulum 2013 menyebabkan guru tidak mengetahui bagaimana cara sistem penilaian yang sesuai dengan ukuran dan standar yang sebenarnya sehingga lembar jawaban UTS pada semester satu tahun ajaran 2014/2015 tertunda hingga tiga minggu. Berikut hasil wawancara dengan guru kelas SDN 01 Pangkalan.

“Proses belajar mengajar di kelas masih seperti biasa. Kami hanya menjelaskan dan memberikan latihan atau tugas kepada anak – anak. Sebenarnya menurut standarnya kurikulum 2013 proses belajar mengajarnya menuntuk anak didik untuk lebih kreatif dan aktif di dalam kelas. Guru hanya sebagai fasilitator di kelas. Oleh karena itu anak didik harus bisa belajar sendiri dan mencari tahu sendiri tambahan pelajaran di luar sehingga pada saat proses belajar mengajar ada feedback dari para murid. Tetapi karena kebiasaan kita dari dulu hanya cenderung menerima dari guru maka siswa/siswi sulit melakukan perubahan.” (Hasil wawancara salah seorang guru kelas SDN 01 Pangkalan pada hari Jumat, 6 November 2015).

Berikut hasil wawancara dengan siswa/ siswi SDN 01 Pangkalan.

“Guru memberikan pelajaran kemudian kami diberikan tugas kak. Kami belum pernah buat tugas dalam kerja kelompok lagi kak. Kami hanya membuat latihan seperti biasa.” (Hasil wawancara dengan siswa/siswi SDN 01 Pangkalan pada hari Jumat, 6 November 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tenaga pengajar SD di Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum melaksanakan proses

belajar mengajar yang sesuai dengan standar dan ukuran kebijakan kurikulum 2013 yang sebenarnya sehingga proses belajar mengajar di kelas masih seperti kurikulum lama dan tidak ada perubahan sehingga tujuan dari kebijakan kurikulum 2013 tidak tercapai.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa/ siswi SDN di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Iya nak saya harus mengeluarkan banyak biaya untuk memfotocopy 6 buku untuk belajar anak saya di sekolah karena buku bantuan dari sekolah belum datang. Jadi kami orang tua murid harus membantu untuk memfotocopy buku di luar agar anak kami bisa memiliki buku untuk belajar di sekolah.” **(Hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa/ siswi SD Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada hari sabtu, 7 November 2015).**

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 07 Pangkalan.

“Setiap program yang dibuat pemerintah pasti ada anggaran biayanya nak. Untuk kurikulum 2013 anggaran biayanya dijadikan buku panduan untuk guru dan siswa. Jadi, kami pihak sekolah hanya diberikan dana dalam bentuk buku bukan dalam bentuk uang. Dana yang ada di sekolah hanya dana BOS. Dana tersebut untuk operasional sekolah dan tidak ada anggaran untuk buku panduan disana. Jadi, itulah yang menyebabkan kami pihak sekolah meminta orang tua menyediakan dana untuk memfotocopy buku yang kami dapatkan dari provinsi lain karena buku dari pemerintah sangat terlambat sampai ke tangan kami.” **(Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 07**

Pangkalan pada hari sabtu, 7 November 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber dana yang tidak memadai menyebabkan implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengalami berbagai kendala dan masalah dimana orang tua siswa/ siswi harus mengeluarkan dana sendiri untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Organisasi formal yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Pada saat kurikulum 2013 dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun ajaran 2014/2015 saya bersama tim sudah menetapkan berbagai strategi program yang akan dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Kegiatan tersebut hanya dilakukan sekali sebelum Kurikulum 2013 pada sekolah dasar diimplementasikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.” **(Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa organisasi

pelaksana kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah melakukan strategi untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum 2013 sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tetapi, kegiatan tersebut hanya satu kali dilaksanakan sebelum kurikulum 2013 diimplementasikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru sehingga strategi yang ditetapkan kurang maksimal sehingga pada saat kurikulum 2013 diimplementasikan masih terdapat berbagai kendala dan kekurangan.

Berikut hasil wawancara dengan pengawas sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Saya bersama kepala UPT dan tim pernah melaksanakan pengawasan satu kali selama kurikulum 2013 diimplementasikan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru karena para guru mengeluhkan sistem penilaian kurikulum 2013 pada sekolah dasar. Selain itu pada saat kami melakukan pengawasan, proses belajar mengajar di kelas masih seperti kurikulum lama sehingga proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar dan ukuran kurikulum 2013 yang sebenarnya tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan guru tentang proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar dan ukuran yang sebenarnya.” **(Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah Dasar Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Maswir, S.Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengawas bersama kepala UPT sudah melakukan pengontrolan pelaksanaan kurikulum 2013 ke sekolah dasar yang ada di Kecamatan

Pangkalan Koto Baru karena keluhan yang dirasakan oleh guru – guru sekolah dasar. Selain itu, hasil pengontrolan yang dilakukan proses belajar mengajar guru di kelas masih seperti kurikulum lama sehingga proses belajar mengajar berdasarkan standar dan ukuran yang sebenarnya tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan guru kelas cara proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar dan ukuran yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi pelaksana yang terlibat dalam kurikulum 2013 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru sudah melaksanakan tugasnya yaitu menetapkan berbagai kegiatan implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar, akan tetapi berbagai kendala masih ditemukan pada saat implementasi kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena berbagai kegiatan yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum terlaksana secara maksimal dimana dibutuhkan waktu yang maksimal lagi untuk melakukan kegiatan tersebut agar pengetahuan para guru lebih memadai dan implementasi kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan baik.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kurikulum 2013 pada sekolah dasar bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) kurikulum 2013 pada sekolah dasar yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kurikulum 2013. Komunikasi merupakan penyampaian informasi kepada para pelaksana kurikulum 2013 tentang apa menjadi standar dan tujuan harus

konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Para pelaksana kurikulum 2013 pada sekolah dasar adalah kepala sekolah, guru siswa/ siswi sekolah dasar. Penyampaian informasi mengenai implementasi kurikulum 2013 kepada para pelaksana dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pelaksana kurikulum 2013.” **(Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).**

Berikut hasil wawancara dengan Instruktur Pelaksana Kurikulum 2013 Perwakilan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Proses pendidikan dan pelatihan para pelaksana kurikulum 2013 dilakukan secara berantai mulai dari dari dinas pendidikan pusat ke provinsi, dari dinas pendidikan provinsi ke kabupaten dan dari dinas kabupaten ke kecamatan. Oleh karena itu para pelaksana yang menerima informasi tersebut merupakan beberapa orang perwakilan saja dan terkadang informasi yang diterima di pusat tidak sesuai dengan informasi yang diberikan ke daerah - daerah. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan para pelaksana yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah tidak memadai sehingga sering terjadi miss communication dan implementasi kurikulum 2013 mengalami berbagai masalah di daerah – daerah.” **(Hasil**

Wawancara dengan Instruktur Pelaksana Kurikulum 2013 Perwakilan Kecamatan Pangkalan Koto Baru ibu Nelwati, S. Pd pada hari Rabu, 28 Oktober 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan para pelaksana kurikulum 2013 dari pusat ke daerah masih terdapat beberapa ketidakkonsistenan sehingga implementasi kurikulum 2013 oleh para implementor di Kecamatan Pangkalan tidak sesuai dengan standar dan tujuan yang sebenarnya karena pengetahuan para implementor yang sangat minim mengenai standar dan tujuan kurikulum 2013 pada sekolah dasar yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan berbagai masalah dan kendala implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana kurikulum 2013 sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum 2013 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kurikulum 2013, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
2. Arahan dan tanggapan pelaksanaan yang meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan.
3. Intensitas repons atau tanggapan pelaksana.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Seluruh kepala sekolah, guru dan orang tua siswa mengeluhkan kurikulum 2013. Kepala sekolah masih banyak yang tidak mengerti dengan manajemen kurikulum 2013. Guru kelas masih banyak yang tidak mengerti dengan standar proses belajar dan standar penilaian. Orang tua siswa – siswi mengeluhkan banyak biaya yang dikeluarkan untuk buku dan tidak mengerti bagaimana membantu anaknya belajar di rumah karena mengingat pendidikan orang tua siswa – siswi sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih banyak yang rendah.” **(Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tanggapan pelaksana kurikulum 2013 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru banyak mengeluhkan berbagai perubahan kurikulum 2013. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 01 Pangkalan.

“Kurikulum 2013 ini terdapat banyak perbedaan dengan kurikulum lama sehingga kami diminta untuk mengajar dengan sistem yang berbeda. Saya masih belum memahami sekali

bagaimana proses belajar mengajarnya, tetapi saya sebagai kepala sekolah berusaha mengarahkan guru kelas untuk mengikuti aturan yang ada.” **(Hasil wawancara dengan kepala SDN 01 Pangkalan Ibu Engga pada hari Selasa, 10 November 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah sebagai pelaksana kebijakan mengarahkan guru kelas agar dapat melaksanakan proses belajar yang sesuai dengan standar dan tujuan kurikulum 2013. Berikut hasil wawancara dengan guru kelas SDN 05 Pangkalan.

“Proses belajar mengajar di kelas masih seperti biasa bedanya adalah mata pelajaran tidak ada lagi, tetapi belajarnya berdasarkan tema dimana dalam satu tema sudah mencakup semua mata pelajaran. Saya menerangkan kepada anak – anak kemudian saya beri tugas. Saya baru satu kali mengikuti pelatihan. Pada saat itu hanya dijelaskan gambaran umum saja, jadi saya masih belum memahami sekali standar pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Saya juga mengeluh dengan perubahan dari kurikulum ini. Karena saya tidak memahami bagaimana sistem penilaian. Banyak sekali perubahan cara sistem penilaiannya karena semua mata pelajaran diglobalkan dalam satu tema.” **(Hasil wawancara dengan guru kelas SDN 05 Pangkalan Ibu pada hari Rabu, 11 November 2015).**

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa para pelaksana kurikulum 2013 masih melaksanakan proses belajar mengajar di kelas seperti kurikulum lama. Pemahaman para

pelaksana kurikulum 2013 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengenai tujuan dan standar implementasi kurikulum yang benar masih sangat minim sehingga tujuan dari kurikulum 2013 tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan pelatihan yang diterima masih satu kali dan para guru masih banyak yang belum mengerti cara pelaksanaan kurikulum yang benar.

Kemudian para pelaksana kurikulum 2013 banyak mengeluh dengan berbagai perubahan dari kurikulum tersebut sehingga pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kurikulum di Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan penolakan dalam menyikapi kebijakan kurikulum 2013 sehingga standar pelaksanaan kurikulum 2013 tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya dan tujuan kebijakan tidak tercapai.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kurikulum 2013. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Lingkungan eksternal tersebut meliputi apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan apakah elite (kelompok yang berkuasa) mendukung implementasi.

Berikut hasil wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

“Ekonomi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru rata – rata menengah ke bawah. Biaya yang dibutuhkan untuk implementasi kurikulum 2013 bukan saja untuk buku. Tetapi kurikulum 2013 juga menuntut siswa – siswi belajar di luar sekolah dan menggali lagi ilmu di luar. Implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan selama satu semester kemaren menimbulkan berbagai keluhan dari orang tua siswa – siswi yang mengeluarkan uang untuk biaya buku. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat disini masih tertutup. Jadi, perlu dilakukan sosialisasi bagi orang tua siswa – siswi agar bisa merubah pola pikir orang tuanya agar bisa membantu manunjang kebutuhan pendidikan anaknya. Karena selama ini orang tua siswa – siswi menganggap sekolah dasar gratis karena ada dana BOS. Sedangkan dana BOS untuk biaya operasional sekolah. Jadi masih perlu biaya di luar operasional yang dituntut dalam kurikulum 2013.” **(Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pangkalan Koto Baru bapak Hasan Basri, S. Pd pada hari Selasa, 27 Oktober 2015).**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya ekonomi masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru kurang memadai. Orang tua murid masih banyak yang mengeluh dengan biaya yang dikeluarkan untuk buku dan penunjang lainnya karena mengingat keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang berada di golongan menengah ke bawah.

Berikut hasil wawancara dengan ketua komite SDN 01 Pangkalan.

“Orang tua murid banyak mengeluh kepada saya ketika kurikulum 2013 diberlakukan kemaren. Mereka mengatakan bahwa sekolah anak kita gratis tetapi mengapa masih disuruh fotocopy buku sedangkan buku disediakan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui ekonomi masyarakat disini memang standar dan pemikiran masyarakatnya sebagian besar masih tertutup. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan orang tua murid. “
(Hasil wawancara dengan ketua komite SDN 01 Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada hari kamis, 12 November 2015)

Lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih memiliki pemikiran yang tertutup mengenai pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 menuntut anak didik untuk mencari pengetahuan di luar lingkungan sekolah sehingga orang tua siswa – siswi harus menunjang hal tersebut agar implementasi kurikulum 2013 berjalan sesuai dengan standarnya. Akan tetapi pemikiran masyarakatnya yang masih tertutup menyebabkan orang tua siswa mengeluh mengeluarkan biaya untuk pendidikan anaknya karena selama ini orang tua siswa – siswi sekolah dasar hanya beranggapan bahwa sekolah dasar biayanya gratis dari pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi bagi orang tua murid diperlukan agar bisa merubah pola pikirnya dan dapat mendukung implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab III, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat berbagai kelemahan pada saat implementasi kurikulum 2013 diantaranya adalah :
 - a. Standarisasi implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum dipahami oleh para implementor. Hal ini juga disebabkan karena SOP implementasi kurikulum 2013 belum ditetapkan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum memadai dimana sosialisasi yang belum maksimal menyebabkan kemampuan guru dalam implementasi kurikulum 2013 tidak memadai. Kemudian keterlambatan penyaluran buku sebagai sarana dalam proses belajar menyebabkan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan standar implementasi kurikulum 2013.
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana yang terlibat dalam Implementasi kurikulum 2013 sudah melaksanakan tugasnya yaitu menetapkan berbagai kegiatan implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar, akan tetapi berbagai kendala masih ditemukan pada saat implementasi kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena berbagai kegiatan yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (UPTD) Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum terlaksana secara maksimal dimana dibutuhkan waktu yang maksimal lagi untuk melakukan kegiatan tersebut agar pengetahuan para guru lebih memadai dan implementasi kurikulum 2013 dapat terlaksana dengan baik.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Dalam bentuk informasi yang diberikan para pelaksana kurikulum 2013 dari pusat ke daerah masih terdapat beberapa ketidakkonsistenan.
 - e. Sikap para pelaksana kurikulum di Kecamatan Pangkalan Koto Baru melakukan penolakan dalam menyikapi kebijakan kurikulum 2013 sehingga standar pelaksanaan kurikulum 2013 tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya dan tujuan kebijakan tidak tercapai.
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak mendukung dalam implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah sosialisai yang belum maksimal, sarana yang belum memadai dan *Standart Oprating Procedure* (SOP) yang belum ditetapkan.

B. Saran

1. Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk ke depannya diharapkan dapat dimaksimalkan lagi agar tujuan dari implementasi kurikulum dapat tercapai. Para implementor hendaknya dapat memahami bagaimana standar implementasi kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan para implementor yang berkompeten. Kemudian

organisasi yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 hendaknya berusaha lebih maksimal lagi agar implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat berjalan sesuai dengan standar dan tujuan kurikulum 2013.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru seperti sosialisasi dapat dimaksimalkan lagi ke depannya agar para implementor kurikulum 2013 siap dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum 2013 hendaknya lebih memadai lagi ke depannya agar proses belajar mengajar di kelas berjalan lancar. Kemudian organisasi pelaksana kurikulum 2013 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru hendaknya dapat membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) sehingga kepala sekolah dan guru dapat memahami bagaimana standar implementasi kurikulum 2013 pada sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Endang, Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hamalik, Oemar. 2013. *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media

- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Media
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Riau: Alaf Riau
- Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan, Model – model Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber lain

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013

Internet

<http://aomvanriest.wordpress.com>

<http://regional.kompas.com/read/2015/01/26/18464961/Mendikbud.Tak.Melarang.Sekolah.Terapkan.Kurikulum.2013>

<http://news.okezone.com/read/2014/08/28/373/1031255/tanda-tanda-kegagalan-kurikulum-2013>